



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), dan merupakan kegiatan pelaporan kinerja yang berkelanjutan setelah perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu wujud transparansi penyelenggaraan pemerintah. Penyusunan LKjIP oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan program/kegiatan dan seberapa besar sasaran strategis dapat diwujudkan. Pembagian urusan sebagai alternatif dalam memudahkan pemahaman yaitu urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Isu gender dan anak menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Adanya ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan ketidakadilan yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan dan kehidupan sosial. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Memberikan akses yang setara terhadap perempuan dan anak perempuan baik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, keterwakilan dalam politik dan ekonomi dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang lebih luas. Kesetaraan gender dapat juga diartikan sebagai upaya memberikan kerangka hukum bagi perempuan di lingkungan pekerjaan serta memberantas praktik diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah Memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa.

Ada beberapa isu strategis terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana di provinsi NTB antara lain :

### **1) ISU STRATEGIS**

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta memperhatikan permasalahan yang disajikan sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi acuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi DP3AP2KB Provinsi NTB dalam koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan. Isu-isu strategis DPAP2KB Provinsi NTB sebagai berikut:

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pemberdayaan perempuan

Tabel 1.1 IPG dan IDG Tahun 2021-2024

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
	Indonesia	NTB	Peringkat	Indonesia	NTB	Peringkat
2021	91,06	90,45	19	75,57	51,96	34
2022	91,27	91,08	19	76,26	53,47	34
2023	91,85	91,39	17	76,90	53,28	NA
2024	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : BPS tahun 2023

Tabel 1.2 Partisipasi perempuan dalam pembangunan Tahun 2022 - 2024

No	Komponen Pembentuk IDG	REALISASI		
		2022	2023	2024
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	1,59	1,54	NA
2	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	33,08	33,04	NA
3	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	46,72	48,60	NA
4	Indeks Pemberdayaan Gender	52,54	53,28	NA
5	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	27,13	27,73	NA

Sumber : DP3AP2KB Th 2023

2. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

Pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indicator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;

Tabel 1.3 Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat KLA Tahun 2021-2024

No	Kab/Kota	Predikat KLA			
		2021	2022	2023	2024
1	Mataram	Madya	Madya	Madya	
2	L o b a r	Madya	Madya	Nindya	
3	L o t e n g	-	-	Pratam	
4	L o t i m	-	Pratama	Pratama	
5	K L U	-	-	Pratama	
6	K S B	-	-	Pratama	
7	Sumbawa	-	Pratama	Pratama	
8	D o m p u	Madya	Madya	Madya	
9	Kota Bima	Pratama	Madya	Nindya	
10	Kab. Bima	Pratama	Pratama	Pratama	

Sumber : DP3AP2KB Th 2023

3. Perlindungan Perempuan dan anak dari kekerasan dan tindak perdagangan orang;

Tabel 1.4 Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2021– 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Lombok Timur	390	230	264	
2	Kabupaten Lombok Barat	140	119	66	
3	Kabupaten Lombok Utara	124	118	149	
4	Kabupaten Bima	81	80	127	
5	Kabupaten Sumbawa	79	64	47	
6	Kabupaten Dompu	68	131	91	
7	Kota Bima	65	41	57	
8	Kota Mataram	54	61	61	
9	Kabupaten Lombok Tengah	38	101	68	
10	Kabupaten Sumbawa Barat	21	39	35	
	Jumlah	1.060	984	965	

Sumber : DP3AP2KB Th 2023

b. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih tingginya kasus perkawinan pertama di bawah usia 20 tahun

Tabel 1.5 Rata-Rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan  
di Provinsi NTB Tahun 2022 – 2024

No	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
1	Lombok Barat	20,54	NA	
2	Lombok Tengah	19,32	NA	
3	Lombok Timur	19,70	NA	
4	Sumbawa	21,50	NA	
5	Dompu	21,00	NA	
6	Bima	21,24	NA	
7	Sumbawa Barat	21,44	NA	
8	Lombok Utara	20,35	NA	
9	Kota Mataram	21,15	NA	
10	Kota Bima	22,03	NA	
	NTB	20,39	NA	

Sumber : BPS NTB

Tabel 1.6 Persentase Pernikahan berdasarkan Kelompok Umur tahun 2018 - 2020

<b>Tahun</b>	<b>Kelompok Umur Perkawinan Pertama</b>									
	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50+	Total
2018	2.30	46.58	36.66	11.27	2.26	0.65	0.16	0.08	0.03	100.00
2019	2.52	46.90	37.14	10.50	2.20	0.48	0.13	0.12	0.01	100.00
2020	20,20	44,92	38,70	11,15	2,13	0,63	0,14	0,12	-	100,00

Sumber : DP3AP2KB Th 2021

## B. Tujuan

### 1) Tujuan Umum

Untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

### 2) Tujuan Khusus

- a. Bahan reassessment terhadap perumusan isu-isu strategis, visi dan misi pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Bahan reassessment terhadap perumusan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja
- c. pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Bahan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran yang dianut pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- e. Akuntabilitas kinerja yang berkualitas merupakan pegangan penting bagi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

## C. Uraian Organisasi

### 1) Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah unsur Pemerintah Daerah

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

## 2) Rincian Tugas Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

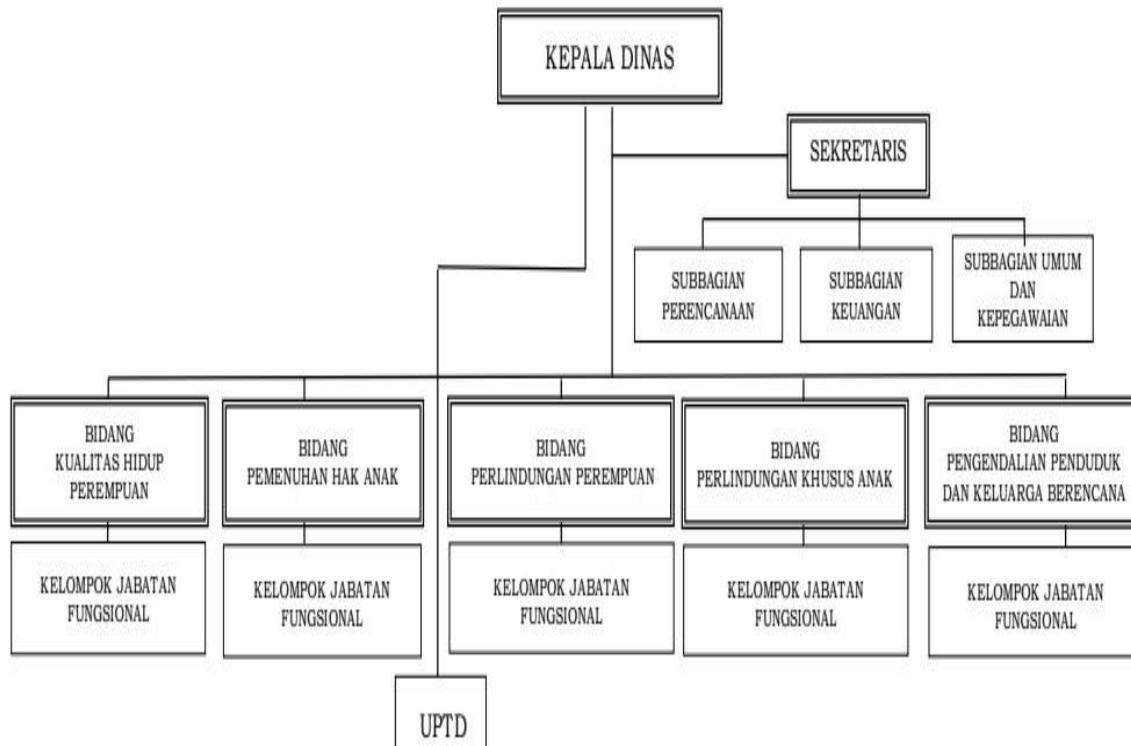
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengkajian, analisis, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui kegiatan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, perlindungan perempuan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta kesekretariatan.
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud No 1 menyelenggarakan fungsi:
  1. Perumusan kebijakan strategis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4. Pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

### 3) Bagan Struktur Organisasi DP3AP2KB Provinsi NTB

LAMPIRAN Ia PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

4) Susunan Kepegawaian

Tabel 1. 7 SDM berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Strata 2	5	8	13
2	Strata I / Diploma IV	12	11	23
3	Diploma III	1	-	1
4	Diploma I	-	-	-
5	SMA / Sederajat	7	6	13
6	SMP	-	-	-
7	SD	-	-	-
Jumlah		29	33	50

Sumber : DP3AP2KB Th 2024

Tabel 1. 8 SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pimpinan Tinggi Pratama	-	1	1
2	Administrator	3	4	7
	Pengawas			
4	Pelaksana	18	17	35
Jumlah		23	22	45

Sumber : DP3AP2KB Th 2024

Tabel 1. 9 SDM Berdasarkan Golongan

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Madya / IV d	-	-	-
2	Pembina Utama Muda / IV c	-	-	-
3	Pembina TK.I / IV b	3	2	5
4	Pembina / IV a	1	3	4
5	Penata TK.I / III d	8	8	16
6	Penata / III c	-	4	4
7	Piñata Muda TK.I / III b	2	3	5
8	Penata Muda / III a	4	-	4
9	Pengatur TK.I / II d	4	5	9
10	Pengatur / II c	3	=	3
11	Pengatur Muda TK.I / II b	-	-	-
12	Pengatur Muda / II a	-	-	-
Jumlah		25	25	50

Sumber : DP3AP2KB Th 2024

Tabel 1. 10 SDM Berdasarkan Diklat Struktural

No.	Diklat Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PIM II	-	-	-
2	PIM III	3	2	5
3	PIM IV	-	-	-

Sumber : DP3AP2KB Th 2024

Tabel 1. 11 SDM Berdasarkan Fungsional

No.	Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Fungsional Tertentu	1	1	2
2	Fungsional Umum	4	5	9
Jumlah		5	6	11

Sumber : DP3AP2KB Th 2024

Tabel 1. 12 SDM Berdasarkan Rentang Usia

No.	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tahun 25 - 35	3	2	5
2	Tahun 36 - 45	9	5	14
3	Tahun 46 - 60	18	22	40
Jumlah		30	29	59

Sumber : DP3AP2KB Th 2024

Tabel 1. 13 SDM Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Islam	29	28	57
2	Hindu	1	1	2
3	Kristen	-	-	-
Jumlah		30	29	59

Sumber : DP3AP2KB Th 2024

Tabel 1. 14 Daftar Pegawai Berdasarkan Urut Jabatan (ESELON)

NO.	N A M A NIP	TEMPAT TGL LAHIR	GOL	T M T	MASA KERJA		JABATAN TERAKHIR	KELAS JAB.	PENDIDIKAN UMUM		
					THN	BLN			TAHUN LULUS	TK	USIA
1	Dra. NUNUNG TRININGSIH,MM.	Mataram	IV/d	1/4/2020	33	1	Kepala Dinas	15	1986	S2	53 th, 5 bl
	19700104 198903 2 004	1/1/1970									
2	Drs. H. MUH. YAHYA, M. Pd	Lombok Timur	IV/b	4/1/2017	19	2	Sekretaris	13		S2	56 th, 0 bl
	196706011987032000	12/31/1967									
3	DEWI RITAWATI, SE.MM		IV/b	4/1/2014			Kabid Kualitas Hidup Perempuan (KHP)	11		S2	53 th, 1 bl
	197005051991032018	5/5/1970									
4	H. HAMZAN WADI, SE, MM	Mataram	IV/b	1/4/2022	27	9	Kabid Perlindungan Perempuan	11	2012	S2	55 th, 4 bl
	19680204 199403 1 010	2/4/1968									
5	Drs. H. ABDURROSYIDIN R, M. Pd	Lombok Tengah	IV/b	10/1/2021	24	4	Kabid Pengendalian Pendudukan dan KB	11	2004	S2	47 th, 0 bl
	19760724 200003 2 006	12/31/1968									
8	SRI WAHYUNI, S. IP	Nganjuk	IV/a	10/1/2022	19	10	Kabid Perlindungan Khusus Anak (PKA)	11	2000	S1	50 th, 3 bl
	19730320 200212 2 004	12/19/1968									
6	GUSTI BAGUS KERTAYASA,S.KM.M.Kes.	Lombok Barat	IV/a	4/1/2014	32	9	Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	9	2006	S2	57 th, 1 bl
	19660523 198903 1 007	5/23/1966									
7	NURAINI ASMARAWATI,SST,MH.	Lombok Tengah	IV/a	4/1/2021	27	11	Pengawas Perempuan dan Anak	7	2010	S2	52 th, 6 bl
	19701231 199401 2 005	12/31/1970									

9	SUHARDI, S.SOS.	Loteng	III/d	1/4/2013	33	9	Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	9	2000	S1	57 th, 6 bl
	19651231 198803 1 023	12/31/1965									
10	ROHATUL AINI,SH	Karang Jangkong	III/d	4/1/2009	32	9	Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	9	2014	S1	54 th, 0 bl
	19690708 198903 2 007	7/8/1969									
11	SITI MUZAKARAH, S.KM.	Mataram	III/d	1/4/2017	16	11	Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	9	2004	S1	47 th, 7 bl
	19751102 200501 2 014	11/2/1975									
12	NILA AULIA, S.T. M.AK.	Mataram	III/d	4/1/2020	12	1	Analis Kebijakan Ahli Muda	10	2017	S2	41 th, 1 bl
	19820515 200803 2 001	5/15/1982									
13	ERLAN, SE.MM.	Lombok Tengah	III/d	4/1/2019	24	9	Analis Kesejahteraan Keluarga	7	2017	S2	49 th, 6 bl
	19731231 199703 1 028	12/31/1973									
14	ARI SUPRIATI,S.KOM	Rabangodu	III/d	4/1/2015	19	0	Analis SDM Aparatur	7	2002	S1	44 th, 2 bl
	19790407 200212 2 011	4/7/1979									
15	RUSLAN JAYADI, S.KM	Mataram	III/d	4/1/2016	27	9	Pengelola Pemberdayaan	6	2010	S1	55 th, 6 bl
	19671231 199403 1 104	12/31/1967									
16	TRISNIWATI ANGGRAINI, S.PD.	Mataram	III/d	4/1/2020	13	11	Analis Keluarga Berencana	7	1998	S1	48 th, 9 bl
	19740905 200801 2 008	9/5/1974									
17	HIMMATUL AMANAH, SKM. MM	Lombok Timur	III/d	4/1/2023	11	9	Kabid Pemenuhan Hak Anak (PHA)	11	2013	S2	45 th, 4 bl
	19780204 200701 2 017	4/2/1978									
18	EVA ELFITRIA, SE.	Malang	III/d	4/1/2022	18	1	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	2003	S1	44 th, 9 bl
	19780922 201001 2 001	9/22/1978									

19	LALU AFRIANTO SALEH, S.SOS.I	Praya	III/d	4/1/2022	12	3	Pengawas Perempuan dan Anak	7	2003	S1	44 th, 2 bl
	19790423 201001 1 015	4/23/1979									
20	ADI SUPRIADI, S. Pd	Sumbawa	III/d	9/1/2023	13	9	Kasubag Umum dan Kepegawaian	9	2008	S1	40 th, 2 bl
	198310142010011011	10/14/1983									
21	BAIQ EFRINDA WINAYASTI,S.Pd	Lombok Tengah	III/d	9/1/2023	12	9	Analisis kinerja	7	2010	S1	36 th, 3 bl
	19870322 201101 2 019	3/22/1987									
22	RAHMATULLAH,SE.M.Ak.	Mataram	III/d	10/1/2022	12	9	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	2017	S2	44 th, 7 bl
	19781119 201001 1 002	11/19/1978									
23	JAYADI ZAENAL, SE.	Mataram	III/d	4/1/2022	18	1	Fungsional Arsiparis	6	2003	S1	43 th, 2 bl
	19800413 201001 1 004	4/13/1980									
24	BAIQ RINI INDRIYATI, SE.M.AK.	Praya	III/d	4/1/2022	12	3	Fungsional Perencana	10	2017	S2	46 th, 9 bl
	19760923 201001 2 003	9/23/1976									
25	MUHAJIRIN	Mataram	III/b	4/1/2011	29	9	Pengelola Akutansi Keuangan	6	2011	SMEA	52 th, 8 bl
	19701231 199203 1 049	12/31/1970									
26	MOCHAMMAD SYAIFULLAH,S.H.	Dompu	III/b	4/1/2020	13	11	Fungsional Arsiparis	7	2004	S1	46 th, 0 bl
	19770712 200801 1 020	07/12/1977									
27	SITI NURHAYATI SIH ARYUNTI, S.Pi	Surabaya	III/b	4/1/2020	12	11	Analisis Laporan Keuangan / Gaji	7	2000	S1	48 th, 0 bl
	19750610 200901 2 002	6/10/1975									
28	HJ.ZULAINI	Mataram	III/b	1/4/2012	14	1	Pengelola Pemberdayaan	6	1989	SMA	53 th, 6 bl
	19691231 199303 2 044	12/31/1969									
29	MARLINA, S.ADM.	Mataram	III/b	1/4/2021	15	9	Analisis Kesehatan Keluarga	7	2014	S1	44 th, 4 bl
	19780823 199803 2 003	23/8/1978									

30	BAMBANG SURYADI, SH	Lombok Tengah	III/a	1/4/2021	11	9	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	5	2003	S1	44 th, 08 bl
	19780412 201001 1 002	4/12/1978									
31	FEBRIAN SUKMA, SM	Lombok Timur	III/a	3/1/2022	0	0	Fungsional Perencana Ahli Pertama	8	2020	S1	26 th, 10 bl
	19960206 202203 1 007	6/2/1996									
32	KASYFUL FAHMI, S. AK	Lombok Tengah	III/a	3/1/2022	0	0	Fungsional Perencana Ahli Pertama	8	2019	S1	28 th, 2 bl
	19940207 202203 1 007	2/7/1994									
33	IKHSAN YUSUF, S. Tr. Ip	Baubau	III/a	1/8/2022	0	0	Staf bidang Pemenuhan Hak Anak		2022	S1	22 th, 6 bl
	20000619 202208 1 003	19/06/2000									
34	HAERUDIN ABDILAH	Mataram	II/d	4/1/2019	14	11	Pengadministrasi Kepegawaian	5	1989	SMA	53 th, 10 bl
	19690212 200701 1 033	2/12/1969									
35	SAIDAH	Mataram	II/d	4/1/2019	14	11	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	6	1988	SMA	55 th, 7 bl
	19670509 200701 2 015	5/9/1967									
36	BAGUS SETIAWAN	Mataram	II/d	4/1/2021	13	11	Pengadministrasi Umum	5	1998	SMA	42 th, 10 bl
	19800216 200801 1 019	2/16/1980									
37	HERMIN	Bima	II/d	4/1/2021	12	11	Bendahara	7	1994	SMA	48 th, 11 bl
	19740115 200901 2 002	1/15/1974									
38	SUKIMAN	Lotim	II/d	4/1/2019	14	11	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	6	1988	SMA	55 th, 0 bl
	19671231 200701 1 239	12/31/1967									

39	SURYADI	Lombok Barat	II/d	1/4/2020	13	11	Pengolah Penguatan Pengarusutamaan Gender	5	1997	SMA	45 th, 0 bl
	19771231 200801 1 040	12/31/1977									
40	ROSALINA	Mataram	II/d	4/1/2022	18	11	Pengelola Pemberdayaan	5	2000	SMK	42 th, 2 bl
	19801011 200901 2 001	10/11/1980									
41	SRI HASTINI	Rembiga	II/d	4/1/2022	18	1	Pengadministrasi Persuratan	5	2001	SMA	40 th, 3 bl
	19820907 201001 2 001	9/7/1982									
42	ERWIN SUHAEDI	Lombok Tengah	II/d	10/1/2022	13	9	Bendahara Barang Milik Daerah (BMD)	5	2004	SMA	36 th, 6 bl
	19860620 201001 1 002	6/20/1986									
43	FAKHRUR RAKHMAN	Lobar	II/c	1/4/2018	11	11	Pengadministrasi Barang Milik Daerah	5	2006	D3	38 th, 3 bl
	19840916 201001 1 005	9/16/1984									

Mataram, 31 Desember 2024

Kepala Dinas,

**Dra. Nunung Triningsih, MM.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700104 198903 2 004

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)**  
**UPTD PERLINDUNGAN PEREMPIAN DAN ANAK**

NO.	N A M A NIP	TEMPAT TGL LAHIR	GOL	T M T	MASA KERJA		JABATAN TERAKHIR	KELAS JAB.	PENDIDIKAN UMUM		
					THN	BLN			TAHUN LULUS	TK	USIA
1	SITI ENY CHAERANY, SH	Mataram	IV/a	10/1/2022	24	7	Kepala UPTD Balai Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP3AP2KB Prov.NTB	11	1993	S1	54 th, 06 bl
	19681219 199403 2 011	12/19/1968									
2	KURNIATI, S.SOS	Sumbawa	III/d	4/1/2015	33	9	Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus (UPT Perlindungan Perempuan dan Anak)	9	2012	S1	55 th, 1 bl
	19680531 198803 2 003	5/31/1968									
3	HERMAN ALI, S.SOS.	Lombok Barat	III/d	4/1/2019	14	11	Kasi Penerimaan dan Klasifikasi pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	9	1994	S1	55 th, 1 bl
	19680514 200701 1 027	5/14/1968									
4	SUNARDY, S.KM.	Bima	III/d	10/1/2014	24	9	Kepala Sub Bag. TU pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	9	2003	S1	50 th, 8 bl
	19721009 199703 1 007	10/9/1972									
5.	MUHAMMAD FATONI	Mataram	II/d	4/1/2020	13	11	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1999	Madrasah Aliyah	43 th, 9 bl
	19790302 200801 1 010	3/2/1979									

Mataram, 31 Desember 2024

Kepala Dinas,

**Dra. Nunung Triningsih, MM.**

Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19700104 198903 2 004

Tabel 1. 15 Aset DP3AP2KB  
Periode 31 Desember 2024

NO	AKUN NERACA	NILAI BMD			SALDO AKHIR	
		SALDO	MUTASI			
			TAMBAH	KURANG		
	<b>Aset</b>	<b>1.638.305.613,00</b>			<b>1.638.305.613,00</b>	
<b>A</b>	<b>Aset lancar</b>	24.929,00			24.929,00	
1	Persediaan					
	Jumlah					
<b>B</b>	<b>Aset tetap</b>	<b>1.638.280.684,00</b>			<b>1.638.280.684,00</b>	
1	Tanah	750.000.000	-	-	750.000.000	
2	Peralatan dan mesin	3.746.981.031,00	-	-	3.746.981.031,00	
3	Alat bengkel dan ukur	724.750,00			724.750,00	
4	Alat Pertanian	22.550.000,00			22.550.000,00	
5	Alat Kantor	261.659.200,00			261.659.200,00	
6	Alat Studio, komunikasi dan pemanclar	81.993.000,00			81.993.000,00	
7	Alat laboratorium	650.000,00			650.000,00	
8	Komputer	716.065.200,00			716.065.200,00	
<b>C</b>	<b>Gedung dan bangunan</b>	1.219.254.000,00	-	-	1.219.254.000,00	
1	Bangunan Gedung	1.204.454.000,00			1.204.454.000,00	
2	Monumen	14.800.000,00			14.800.000,00	
<b>D</b>	<b>Aset tetap lainnya</b>	5.520.000,00	-	-	5.520.000,00	
	Akumulasi Penyusutan	(4.083.474.347,00)	-	-	(4.083.474.347,00)-	
	JUMLAH ASET TETAP	1.638.280.684,00			1.638.280.684,00	
<b>C</b>	<b>Aset Lainnya</b>	-			-	
	<b>Jumlah</b>	1.638.305.613,00			1.638.305.613,00	

## D. ANALIS LINGKUNGAN STRATEGIS

### 1) Lingkungan Internal

#### a. Strength (Kekuatan)

1. DP3APPKB sebagai pusat pelayanan dan informasi untuk isu perempuan dan anak tingkat Provinsi NTB.
2. Sumber daya manusia
3. Mempunyai akses jaringan koordinasi yang luas dengan dengan lembaga dan stakeholder
4. Kapasitas teknik terkait gender, PUG melalui PPRG dan mekanisme perlindungan perempuan dan anak.

b. Treath (Ancaman)

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk pada tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTB relatif tinggi.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun kekerasan terus mengalami tren peningkatan. Namun demikian, tingginya angka kekerasan menunjukkan adanya keberanian bagi pihak korban untuk melapor. Hal ini tidak terlepas dari peran media massa dan teknologi;

2. Persentase keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di tingkat Provinsi di NTB pada Periode 2020-2024 adalah 1,59%.

Kondisi ini masih jauh dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Kebijakan afirmasi bagi perempuan untuk menduduki kuota 30 persen kursi di parlemen masih jauh dari target;

3. Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan;

4. Lemahnya koordinasi antar OPD driver dan OPD yang tergabung sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) PUG baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;

5. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas baik terkait pengarusutamaan gender maupun kualitas keluarga serta pentingnya data dan informasi gender;

6. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tentang 8 Fungsi Keluarga, Gender, kesetaraan dan keadilan gender;

7. Belum adanya MoU antar lembaga dalam meningkatkan kualitas keluarga;

8. Lemahnya koordinasi OPD yang tergabung sebagai anggota Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat kabupaten/kota.

9. Komitmen OPD yang tergabung sebagai Gugus Tugas KLA belum optimal.

10. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;

11. Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan Indikator KLA, serta minimnya

implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif hak anak di kab/kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;

12. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan;
13. Penduduk perempuan yang diproyeksikan lebih sedikit dari penduduk laki-laki membuat peluang SDM perempuan potensial menjadi menurun.
14. Total Fertility Rate NTB masih tinggi di angka 2,46. Artinya rata-rata seorang perempuan berusia 15 - 49 tahun di NTB melahirkan 2-3 anak sepanjang hidupnya. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran ber KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Sebagian besar akseptor KB Perempuan menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (suntik 36,8 % dan pil 7,1 %) yang tingkat kegagalannya relative tinggi dibandingkan bila menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, susuk atau sterilisasi wanita;
15. Kasus stunting yang masih tinggi.

c. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan Perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut:

1. Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
2. Adanya Pergub No. 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Nusa Tenggara Barat;
3. Adanya dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ormas, dan Organisasi Perempuan (BKOW, DWP, PPI, dll) dalam hal pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak;
4. Adanya UPT PPA di masing-masing Kab/Kota serta di tingkat Provinsi yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan maupun anak;
5. Adanya Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang panduan pengembangan kabupaten/kota layak anak;
6. Adanya *platform*, baik portal website, sosial media yang menjadi sarana sosialisasi dan promosi bagi kegiatan-kegiatan DP3AP2KB Provinsi NTB;
7. Adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk mendukung upaya pemenuhan hak di Kab/Kota melalui pemenuhan indikator KLA;

8. Telah terbentuknya forum anak di tingkat provinsi maupun Kab/Kota serta pengembangannya di tingkat kecamatan dan desa;
9. Tersusunnya dokumen GDPK sebagai pedoman dalam menentukan arah pembangunan kependudukan dalam 25 tahun mendatang;
10. Adanya peran lintas sektor dalam mendukung arah pembangunan kependudukan sesuai yang tercantum dalam dokumen GDPK;
11. Adanya komitmen kepala daerah melalui kebijakan penurunan angka stunting di Provinsi NTB.

## **E. DASAR HUKUM**

Dasar hukum dibuatnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini meliputi:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN / 5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/ M.PAN/ 11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021;

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

LKjIP DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2023 terdiri dari 4 Bab, secara garis besar menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, tujuan, uraian organisasi, analisis lingkungan strategis, dasar hukum dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Secara ringkas perjanjian kinerja tahun 2021

### 3. BAB III, AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

### 4. BAB IV, PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan langkah-langkah peningkatan kinerja

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- a. Pengukuran dan pencapaian kinerja
- b. Indikator kinerja utama (IKU)
- c. Rencana kinerja
- d. Perjanjian kinerja
- e. Rencana aksi
- f. Capaian kinerja per triwulan
- g. Data cakupan



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan

Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum pada RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yang mencerminkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB yaitu seperti tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB

<b>TUJUAN RPD : <i>Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Yang Mandiri</i></b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Terwujudnya Kesetaraan Gender	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan dan perlindungan;</li> <li>2. Peningkatan Kualitas keluarga;</li> <li>3. Optimalisasi pemamfaatan Data Gender Anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan pelembagaan PUG;</li> <li>2. Pemberdayaan perempuan bidang pendidikan, kesehatan,ekonomi,politik ,hukum dan sosial;</li> <li>3. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan;</li> <li>4. Penyediaan, penguatan, dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan dan perlindungan perempuan;</li> <li>5. Peningkatan kualitas keluarga</li> </ol>
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Anak	Terwujudnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Penguatan dan pengembangan lembaga layanan anak dan optimalisasi pemamfaatan system data anak	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan PHA dan PKA; Pencegahan kekerasan terhadap anak; Pemamfaatan data anak

wuTerwujudnya Penduduk Tumbuh seimbang	Terwujudnya peningkatan kepesertaan ber-KB	Pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas keluarga. Pengembangan desain dan pelaksanaan KIE, pengendalian penduduk dan KB Penitahatan peran organisasi kemasyarakatan dan pembinaan KB.
--	--	--	---

## 1) PERMASALAHAN

- a. Permasalahan terkait dengan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak
  - ✓ Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi NTB masih rendah
  - ✓ Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota
  - ✓ Kurangnya kapasitas dan akses perempuan dalam bidang ekonomi dan politik;
  - ✓ Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender;
  - ✓ Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender;
  - ✓ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan utamanya data terpilah lintas sektor.
  - ✓ Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
  - ✓ Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak;
  - ✓ Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan;

Tabel 2. 2 Data Indeks Pembangunan Gender (IPG)

<b>No</b>	<b>Komponen Pembentuk IPG</b>	<b>Nusa Tenggara Barat</b>					
		<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>	
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L</b>	<b>P</b>
1	Angka Harapan Hidup	65,14	69,07	65,54	14,1	NA	NA
2	Harapan Lama Sekolah	14,09	13,95	14,1	13,96	NA	NA
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,16	6,92	8,25	7,15	NA	NA
4	Pengeluaran Perkapita	14,615	9,263	15,170	9,581	NA	Na
5	Indeks Pembangunan Gender	91,08		91,39		NA	

Sumber, BPS NTB Tahun 2023

Tabel 2. 3 Data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

<b>No</b>	<b>Komponen Pembentuk IDG</b>	<b>REALISASI</b>		
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	1,56	1,54	NA
2	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	33,06	33.04	NA
3	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	47,46	48,60	NA
4	Indeks Pemberdayaan Gender	53,47	53,28	NA
5	<b>Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan</b>	<b>26,87</b>	<b>27,37</b>	<b>27,62*</b>

Sumber, BPS NTB Tahun 2023

- b. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak :
- 1) Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - 2) Belum optimalnya penanganan perlindungan hak bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko;
  - 3) Belum optimalnya kualitas lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana :
- Urusan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2015-2020

adalah 1,63% per tahun, jumlah penduduk NTB sampai dengan september 2020 sebesar 5,32 juta jiwa atau ada tambahan 819,88 ribu jiwa bila dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010, ada beberapa permasalahan terkait dengan urusan ini yaitu:

- 1) Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP;
- 2) Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE;
- 3) Belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) Rendahnya pengintegrasian program kependudukan di SMA/SMK sehingga Program KKBPK kurang optimal;
- 5) Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan keluarga berencana (KB) sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 6) Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB.
- 7) Angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi masih cukup tinggi, hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah Rata – Rata Usia pernikahan pertama bagi perempuan (khususnya) masih rendah (terlalu muda menikah)
- 8) Tingginya perkawinan pertama yang berisiko bagi perempuan

Tabel 2.4 Capaian Indikator Pertumbuhan Penduduk Dan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan

No	Indikator Bidang Urusan	Target			Realisasi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Pertumbuhan Penduduk	1,1	1.07	1	1,63	1,31	1,39
2	Rata—rata Usia kawinPertama Perempuan	20,5	20,7	20,7	20,35	20,39	20,46

Tabel 2.5 Angka Perkawinan Anak di Indonesia dan Provinsi NTB Tahun 2020-2024

No		Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	NTB	16,59	16,2	17,32	
2	INdonesia	9,23	8,06	6,92	

## 2) ISU STRATEGIS

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk **dan** keluarga berencana serta memperhatikan permasalahan yang disajikan sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi acuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi DP3AP2KB Provinsi NTB dalam koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan. Isu-isu strategis DPAP2KB Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Belum Optimalnya pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam pembangunan

- b. Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan masih tingginya kasus kekerasan serta perdagangan orang bagi perempuan dan anak
- 2. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. Masih tingginya kasus perkawinan pertama di bawah usia 20 tahun
  - b. Belum Optimalnya Pengendalian Penduduk

### **3) TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum pada RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yang mencerminkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Yaitu Seperti Pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2. 6 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-					Formulasi
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Tujuan1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan		Indikator tujuan : Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,43	90,46	90,49	90,52	90,67	Rilis BPS <i>Formulasi perhitungan yaitu:</i> $\text{IDG} = \frac{(I(\text{par}) + I(\text{dm}) + I(\text{inc-dis}))}{3}$ I (par) = indeks keterwakilan di parlemen I (dm) = indeks pengambilan keputusan I (ins-dis) = indeks distribusi pendapatan <i>Tipe perhitungan yaitu kumulatif.</i> <i>Sumber data yaitu BPS Provinsi NTB</i> <i>Alasanya yaitu semakin sejajarnya peran perempuan dan laki-laki semakin baik perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.</i>
		Terwujudnya Kesetaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender(IDG)	57,81	59,81	61,16	61,4	54,39	Rilis BPS
			Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	17,93	18,6	19,27	29,47	33,15	Rilis BPS

2	Tujuan 2 Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Anak		Cakupan Kab/Kota Yang mendapat Penghargaan KLA tingkat Madya dan Nindya				60	Rilis BPS
		Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perkawinan Usia Anak				15,0	Rilis BPS
3	Tujuan 3 Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang		Laju Pertumbuh an Penduduk	1,08	1,04	1,00	0,95	1,46
		Sasaran 1 Terwujudnya Peningkatan Kepesertaan ber-KB	mCPR				75,0	BKKBN

#### **4) STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, perlu dirumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan ini disusun untuk mengurai langkah-langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, khususnya dalam mewujudkan tujuan RPD, yakni “Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri”, dengan sasaran “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan serta Kesejahteraan Lahiriah (Fisik) dan Rohaniah (Non Fisik).”

Arah kebijakan dan strategi disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan DP3AP2KB Provinsi NTB tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.... Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Tujuan RPD : Terwujudnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat yang mandiri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas hidup perempuan	Terwujudnya kesetaraan Gender	1) Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; 2) Peningkatan kualitas keluarga; 3) Optimalisasi pemamfaatan system data gender.	1) Penguatan Pelembagaan PUG; 2) Pemberdayaan perempuan bidang pendidikan,kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan sosial' 3) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan; 4) Penyediaan, penguatan dan pengembangan

			<p>lembaga penyedia layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;</p> <p>5) Peningkatan kualitas keluarga;</p>
Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap anak	Terwujudnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	1) Penguatan dan pengembangan lembaga layanan anak dan optimalisasi pemamfaatan sistem data anak	<p>1) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan PHA dan PKA;</p> <p>2) Pencegahan kekerasan gerhadap anak;</p> <p>3) Pemamfaatan data anak/</p>
Terwujudnya Penduduk Tumbuh seimbang	Terwujudnya peningkatan kepesertaan ber KB	Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga	<p>1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijaka pengendalian kuantitas penduduk;</p> <p>2) Pengembangan desain dan pelaksanaan KIE, pengendalian penduduk dan KB;</p> <p>3) Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan KB</p>

## B. PERJANJIAN KINERJA

Pada Tahun 2024 Terjadi penyusunan Rencana Perangkat Daerah (RPD) Provinsi NTB oleh Kenenterian PAN sehingga dilakukan penyesuaian juga pada Resntra OPD terkait Sasaran, tujuan dan indikator kinerja

### 1) Indikator kinerja utama (IKU)

Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Indeks Pembangunan Gender	<p>Menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan</p> <p>Formula:</p> <p>Perhitungan dilakukan oleh BPS dengan menggunakan instrumen seperti IPM.</p> <p>Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG</p> <p>Sumber data: BPS</p>
		Indeks Pemberdayaan Gender	<p>Menggambarkan pencapaian pemberdayaan gender di suatu wilayah</p> <p>Formula:</p> <p>Dihitung BPS menggunakan Instrumen seperti Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG</p> <p>Sumber data: BPS</p>
		Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempua	<p>Menggambarkan secara rata-rata umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan</p> <p>Formula:</p>

			<p>Ket.:</p> <p><math>Ui</math> = umur perkawinan pertama wanita ke-<math>i</math></p> <p><math>n</math> = jumlah wanita menurut perkawinan pertam</p>
		<p>Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan</p>	<p>Menggambarkan tingkat pasrtispasi perempuan dalam proses pembangunan daerah Formula: rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbang pendapatan perempuan Sumber data: BPS</p>
		<p>Pertumbuhan penduduk (%)</p>	<p>Menggambarkan tingat pertambahan penduduk setiap tahunnya Formula  Sumber data: BPS</p>

		mCPR (modern Contraceptive Prevalence Rate): PUS yang menggunakan alat kontrasepsi modern	Menggambarkan Pasangan usia subur yang telah menggunakan kontrasepsi modern Formula:  Sumber data: BKKBN
--	--	---	---

## 2) Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja utama yang relevan dengan tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB Tahun 2024- 2026. Selanjutnya perjanjian kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,39 Point
2	Terwujudnya Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Angka perkawinan Usia Anak	15,00%
3	Terwujudnya Peningkatan kepesertaan ber KB	mCPR	75,0 %

## 3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja tahunan merupakan rencana hasil yang akan dicapai seperti pada

Tabel 2. 9 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024

:NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,39 Point
2	Terwujudnya Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Angka Perkawinan Usia Anak	15,00%
3	Terwujudnya peningkatan kepesertaan ber-KB	mCPR	75%

Tabel 2. 10 Program yang mendukung indikator kinerja (APBDP)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	90.297.950	Sumber dana APBD.NTB Mendukung sasaran strategis Nomor 1, Indikator Kinerja Nomor 1.
2	Program Perlindungan Perempuan	263.121.900	Sumber dana APBD Dan DAK Non Fisik Mendukung sasaran strategis Nomor 1, Indikator Kinerja Nomor 1.
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	230.515.000	Sumber dana APBD Mendukung sasaran strategis Nomor 1, Indikator Kinerja Nomor 1.
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	404.625.050	Sumber dana APBD NTB Mendukung sasaran strategis Nomor 2, Indikator Kinerja Nomor 2,
5	Program Perlindungan Khusus Anak	290.516.300	Sumber dana APBD NTB Mendukung sasaran strategis Nomor 2, Indikator Kinerja Nomor 2,
7	Program Pengendalian Penduduk	35.000.000	Sumber dana APBD NTB Mendukung sasaran strategis Nomor 3, Indikator Kinerja Nomor 3,
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	293.000.000	Sumber dana APBD NTB Mendukung sasaran strategis Nomor 3, Indikator Kinerja Nomor 3,
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	244.050.000	Sumber dana APBD NTB Mendukung sasaran strategis Nomor 3, Indikator Kinerja Nomor 2,
10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	8.407.433.643	Sumber dana APBD NTB Mendukung sasaran strategis Nomor1,2Dan 3, Dan Indikator Kinerja Nomor 1,2 Dan 3,

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap penggunaan anggaran dan sumber daya terkait pelaksanaan amanah yang diemban. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKjIP, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Penyusunan LKjIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Landasan penyusunan LKjIP DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024- 2026, Dan Renstra DP3AP2KB 2024-2026.

Penyusunan LKjIP DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 didasarkan pada hasil Pengukuran Kinerja dan pencapaian target indikator sasaran atas Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Capaian kinerja adalah suatu proses pengukuran reguler atas output (keluaran) yang dihasilkan suatu program dan kegiatan. Berikut ini uraian untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan sasaran strategis sebagai berikut:

### A.1. Terwujudnya Kesetaraan Gender

Penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2023 diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD NTB 2019-2023 khususnya misi keenam “NTB Aman dan Berkah” dengan sasaran Terwujudnya Kesetaraan Gender. Untuk mengukur sasaran tersebut adalah dengan menggunakan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Perempuan Di Dalam Pembangunan yang bisa dilihat dari indeks Pembangunan Gender (IDG) yang mencerminkan keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional dan ekonomi diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan.

#### 1.1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan dilihat dari kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional dan ekonomi diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan

##### a. Membandingkan antara target dan realisasi

Realisasi kinerja Tahun 2023 masih dibawah/atasi target kinerja seperti pada table 3.1 berikut

Tabel 3. 1 Target dan Realisasi

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2024		% Realisasi
		Target	Realisasi	
1	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>	<b>54,39</b>		

Berdasarkan tabel tersebut bahwa pada tahun 2024 untuk pencapaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum bisa mencapai target dengan tingkat capaian 88,32%\*

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, seperti tabel 3.2

Tabel 3. 2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 – 2023

No	Indikator (Satuan)	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)</b>	<b>53,97</b>	<b>53,28</b>	<b>54,39</b>	

Realisasi kinerja pada tahun 2023 yaitu 53,28 Point sedangkan Tahun 2024 adalah .....sehingga pada tahun 2024 capaian realisasi kinerja mengalami peningkatan ..... point..

Tabel 3. 3 Pembanding Komponen Pembentuk IDG Tahun 2021 – 2023

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)			Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)			Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	NUSA TENGGARA BARAT	1,59	1,54		47,46	48,60		33,06	33,04		53,47	53,28	

Angka IDG Provinsi NTB pada tahun 2022 sebesar 53,47 mengalami penurunan menjadi 53,28 pada tahun 2023 serta pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi .....Pada Tahun 2024 ini dharapkan nilai IDG Provinsi NTB Tidak terlalu jauh dengan nilai IDG Nasional, Akan Tetapi karena sampai saat ini Nilai IDG Nasional masih belum release maka belum bisa dibandingkan. Namun apabila mengacu pada tahun 2023 maka kondisi yang terjadi adalah Pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan Nilai IDG nasional yang telah mencapai 76,90 point maka pemberdayaan gender di Provinsi NTB jauh dibawah rata-rata nasional. Rendahnya IDG Provinsi NTB dipengaruhi oleh rendahnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang mencakup keterlibatan perempuan di parlemen yang hanya sebesar 1,54 yang sangat sulit untuk mengalami peningkatan sampai tahun depan hal ini dikarenakan komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh hasil pemilihan anggota legislatif yang hanya dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sekali, sedangkan perempuan sebagai tenaga profesional pada tahun 2023 sebesar 48,60. Untuk sumbangan pendapatan perempuan dalam perekonomian keluarga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 33,06 persen menjadi 33,04 persen.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Realisasi kinerja terhadap capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sampai dengan akhir tahun dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yakni sebesar 54,39 Poin (sesuai usulan revisi target RPJMD) semnetara pada tahun 2023 sebesar 52,28 point masih sulit untuk tercapai kalau kita melihat rata-rata kenaikan setiap tahunnya kurang dari 1 (satu) digit. Hal ini dikarenakan terdapat salah satu komponen pembentuk IDG yaitu komponen keterlibatan perempuan di parlemen yang tidak bisa mengalami kenaikan secara signifikan setiap tahunnya, hal ini dikarenakan sangat tergantung dengan hasil pemilihan anggota legislatif yang dilaksanakan hanya setiap 5(lima) tahun sekali.

1) Perbandingan dengan standar nasional

Karena Data Indeks Pemberdayaan Gender di Tingkat Nasional belum release maka kita belum bisa membandingkan dengan IDG Provinsi NTB tahun 2024 sebesar ....

Tabel 3. 4 Perbandingan dengan standar nasional

NO	INDIKATOR	NTB			NASIONAL		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>IDG</b>	53,47	53,28	53,28	76,22	76,90	7

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang ditawarkan

Perangkat Daerah Provinsi NTB telah menerapkan Anggaran Responsif Gender mencapai 100 %, anggaran ini diharapkan mampu menjadi stimulus kesenjangan gender di NTB. Capaian ini didukung oleh komitmen pimpinan dan kerjasama semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Komitmen dan capaian implementasi Pengarusutamaan Gender ini telah mendapat apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dimana Provinsi NTB mendapat Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Level Pratama Tingkat Nasional Tahun 2023 .

Prestasi APE ini juga diraih oleh 3 (Tiga) Kabupaten/Kota yaitu :

- 1) Kabupaten Dompu mendapat APE kategori Madya;
- 2) Kabupaten Mataram mendapat APE kategori Madya;
- 3) Kota Sumbawa mendapat APE kategori Pratama;

e. Alternatif solusi yang ditawarkan

Untuk alternative solusi yang ditawarkan pada tahun 2024 ini belum dapat kita gambarkan, karna kita belum bisa mendapatkan data secara nasional sebagai pembanding dengan data provinsi NTB, Akan tetapi secara garis besar melihat dari data tahun 2023 maka dapat diambil solusi sebagai berikut :

1. Dalam upaya untuk meningkatkan IPG dan IDG Provinsi NTB pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang perlu adalah :
  - a. Komitmen pimpinan dan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender di segala bidang kehidupan dan seluruh aspek pelaksanaan pembangunan;
  - b. Mengusulkan kembali program kegiatan yang disesuaikan dengan target tahunan dengan memperhatikan potensi, program prioritas/unggulan yang harus dikembangkan sesuai dengan target RENSTRA 2019-2023 dan memiliki daya ungkit terhadap IPG dan IDG Provinsi NTB.
  - c. Meningkatkan pengawalan, pendampingan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas implementasi/penerapan PUG.
  - d. Mengkoordinasikan rencana program dengan Bappeda sebagai leading sector perencanaan pembangunan daerah tentang skala prioritas program kegiatan sesuai dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan koordinasi pengawasan dengan Inspektorat dalam pelaksanaan PPRG di Perangkat Daerah;
  - e. Melakukan penataan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas SDM sesuai dengan potensi dan kompetensi mengingat bahwa PUG sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus mendapat perhatian karena memegang peran penting.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- 2) Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi .Serta Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan

3) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengelola perencanaan (gender focal point) dan meningkatkan kualitas kader perempuan di partai politik, meningkatkan perempuan sebagai tenaga profesional dan meningkatkan sumbangannya pendapatan perempuan yang dimplementasikan melalui Penerapan Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada Tahun 2024 target IDG 54,39 dengan realisasi sebesar.....

Berbagai upaya telah dilakukan oleh DP3AP2KB dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2024 dengan program dan kegiatan sebagaimana table berikut.

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sesuai dengan Perjanjian Kinerja			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
1	Terwujudnya Kesetaraan Gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	5%	1,79%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isu gender belum dianggap sebagai prioritas utama, sehingga banyak sub kegiatan yang tidak dianalisis.</li> <li>Dana yang tersedia secara keseluruhan terbatas, sehingga anggaran untuk isu gender dianggap tidak mendesak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadvokasi Perangkat Daerah untuk melakukan analisis sub kegiatan yang menjadi isu prioritas di masing-masing PD sehingga anggarannya tidak rawan direlokasi.</li> <li>Menyarankan agar PD menganalisis lebih dari satu sub kegiatan.</li> </ul>
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah PD yang mendapat pendampingan ARG	49 PD	49 PD		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran PUG	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi	1 Lap	1 Lap		

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sesuai dengan Perjanjian Kinerja			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
		Kewenangan Provinsi	pelaksanaan PUG kewenangan Provinsi				
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perlindungan terhadap perempuan	875 Orang	875 orang		
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Kab/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi / Edukasi	860 orang	860 orang		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dok	1 Dok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon masyarakat atau pemerintah kabupaten/ kecamatan yang kurang antusias.</li> <li>• Pihak perguruan tinggi yang masih berkesan menutupi atau kurang responsif jika akan dilakukan sosialisasi.</li> </ul>	Melakukan pendekatan kepada masyarakat/ pemerintah kabupaten/ kecamatan dan perguruan tinggi terkait pentingnya pemahaman isu kekerasan terhadap perempuan
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Cakupan Penguatan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	60 Org	15 Org		
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan	60 Org	15 org	Kurangnya kolaborasi program dengan pihak terkait	Berkoordinasi lebih intensif terkait perencanaan dengan para pihak Advokasi mengenai

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sesuai dengan Perjanjian Kinerja			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
		Kekerasan Kewenangan Provinsi	bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat Peningkatan Kapasitas				pentingnya program terkait dengan para pihak
		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100 org	-	Ketidakpastian alur pengadaan dan dokumen karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berganti	Penataan kembali pejabat pengadaan, PPK di OPD
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Provinsi dan Lintas Kab Daerah Kab/Kota	Jumlah Penerima pengaduan perempuan korban kekerasan dan TPPO Kewenangan Provinsi	70 org	29 org	Belum adanya tenaga ahli (psikolog klinis) yang berstatus ASN jasa psikolog dari luar institusi	Pengusulan tenaga ahli (psikolog klinis) kepada BKD.
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	60 Layanan	29 Layanan	Minimnya kesadaran dari masyarakat untuk melapor dan melakukan pengaduan ke UPTD PPA	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberdaan UPTD PPA baik di tingkat Provinsi maupun kab/kota.
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kelompok Kegiatan TRIBINA yang dibina	30%	0%	Program ini dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan BKOW sebagai mitra pelaksana, sehingga terdapat perbedaan	Menyesuaikan pelaksanaan program dengan pendekatan dan prioritas organisasi mitra

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sesuai dengan Perjanjian Kinerja			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
						sasaran, kegiatan, dan sub-kegiatan dibandingkan dengan target dalam dokumen perencanaan awal.	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Perempuan Rentan yang Berkerja	85%	0%	Kegiatan ini dilaksanakan oleh organisasi mitra, sehingga terdapat perbedaan sasaran kegiatan, dengan dokumen perencanaan awal.	Menyesuaikan kegiatan dengan pendekatan dan prioritas organisasi mitra.
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kab/Kota	49 PD	-	Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh organisasi mitra, sehingga terdapat perbedaan sasaran sub kegiatan, dengan target dalam dokumen perencanaan awal	Menyesuaikan sub kegiatan dengan pendekatan dan prioritas organisasi mitra
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Dok	4 Dok	Kegiatan dilaksanakan oleh organisasi mitra dengan sumber dana yang terbatas sehingga hanya terlaksana 4 kegiatan	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dari dana yang tersedia

Pada tahun 2024, Dinas P3AP2KB Provinsi NTB telah melaksanakan berbagai program strategis dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program-program ini dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan yang responsif gender, memperkuat pemberdayaan perempuan, serta mendorong pencapaian predikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Selain itu, fokus utama juga diarahkan pada upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang menjadi salah satu prioritas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua.

Tabel 3. 5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Program	Indikator	Satuan	2024						Relevan/Tidak Relevan	Efisiensi.
			Target	Realisasi Fisik	Tk Capaian	Pagu	Realisasi Keu	Tk Capaian		
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender	persen	5	99.43	100	90,297,950	88,080,774	97,5 %	Relevan	2.217.176
Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Terhadap Perempuan	Orang	460	93.55	100	165,499,900	145,272,672	87,78 %	Relevan	20227228
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Persentase Kelompok Kegiatan Tribina Yang dibina	Per센	85	99.21	99,90	336,795,000	325,591,000	96,7%	Relevan	11.204.000

- g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- 2) Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pengelola gender tentang GAP dan GBS setiap perangkat daerah. Jadi bila pengelola sudah memahami penyusunan GAP dan GBS berarti dengan mudah menyusun GAB dan GBS berdasarkan program dan kegiatan yang ada di OPD. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Pengarusutamaan Gender menjadi strategi yang sangat penting untuk dilakukan percepatan implementasinya. Di Provinsi NTB upaya-upaya yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender yang berada pada semua bidang pembangunan yang tersebut di semua Perangkat Daerah Provinsi NTB. Hal ini dapat dilihat dari seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTB telah menerapkan Anggaran Responsif Gender mencapai 100 % yang dibuktikan dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Tahun 2022 untuk perencanaan dan penganggaran tahun 2022 sebagai langkah awal dalam meningkatkan komponen pembentuk IDG. Capaian ini didukung oleh komitmen pimpinan dan kerjasama semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

## **A.2. Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak.**

sasaran strategis terwujudnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, diukur dengan indikator angka perkawinan anak. Program yang diimplementasikan dalam mencegah perkawinan anak yaitu:

1. Program pemenuhan hak anak
2. Program perlindungan khusus anak
3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera

Urusan perlindungan anak yang diampu Dinas P3AP2KB Provinsi NTB berfokus pada upaya pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan khusus anak. Pada tahun 2024, perhatian utama dalam bidang perlindungan anak diarahkan untuk menurunkan angka perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan masalah utama yang dihadapi yakni tingginya angka perkawinan anak. Berdasarkan data BPS (Susenas), pada tahun 2024 NTB tercatat sebagai provinsi dengan persentase perkawinan anak tertinggi di Indonesia, mencapai angka 14,96 persen. Situasi ini memerlukan respon serius, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan dan masa depan anak. Oleh karena itu, DP3AP2KB Provinsi NTB terus berupaya untuk mencegah perkawinan anak melalui kebijakan dan program yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pencegahan perkawinan anak terus didorong dengan berkoordinasi bersama berbagai stakeholders, seperti NGO, Organisasi Masyarakat (Ormas), serta perangkat daerah dan instansi di tingkat provinsi yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Perkawinan Anak (PPA). Selain itu, DP3AP2KB juga telah melaksanakan upaya preventif dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan provinsi dan desa model DRPPA/KRPPA sebagai langkah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Meski angka perkawinan anak masih tinggi, namun dimensi lain dari pemenuhan dan perlindungan khusus anak di NTB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan ke arah lebih baik. Kondisi ini dapat dilihat dari meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di NTB. Pada tahun 2023, Provinsi NTB berhasil ditetapkan menjadi Provinsi Layak Anak yang menunjukkan bahwa seluruh Kab./Kota di Provinsi NTB telah memeroleh Predikat KLA. Sementara pada tahun 2024 penilaian KLA masih pada tahap verifikasi administrasi. Hasil verifikasi administrasi KLA dapat dilihat pada tabel berikut.

### **1.2. Angka Perkawinan Usia Anak**

Provinsi NTB menurut data terbaru tahun 2024 merupakan Provinsi dengan Perkawinan Anak Tertinggi Tingkat nasional. Meski angka perkawinan anak masih tinggi, namun dimensi lain dari pemenuhan dan perlindungan khusus anak di NTB dalam beberapa tahun terakhir

menunjukkan perubahan ke arah lebih baik. Kondisi ini dapat dilihat dari meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di NTB

a. Membandingkan antara target dan realisasi

Dari Tabel dibawah dapat diliat bahwa Realisasi kinerja Tahun 2024 ini mengalami penurunan dari target kinerja yaitu target 2024 sebesar 15 persen dan realisasinya adalah sebesar 14,96. Artinya bahwa terjadi penurunan angka perkawinan anak yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang diharapkan sebelumnya.

Tabel 3.1 Angka Perkawinan Anak tahun 2023-2024

No	Sasaran	Indikator	2024	
			Target	Realisasi
1	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak	Angka Perkawinan Usia Anak	15%	14,96%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2024

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, seperti tabel 3.2

Tabel 3.2 Angka Perkawinan Anak tahun 2023-2024

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2023	2024	
				Target	Realisasi
1	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak	Angka Perkawinan Usia Anak	17,32%	15%	14,96%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2024

Dari Tabel diatas dapat diliat bahwa angka perkawinan anak pada tahun 2024 mengalami penurunan disbandingkan tahun 2023 yaitu dari 17,32 persen turun menjadi 14,96 persen , Hal ini menunjukkan perkembangan yang sifatnya positif, dimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah perkawinan anak mendapatkan hasil yang positif meskipun pada tingkat nasional masih menjadi provinsi dengan jumlah perkawinan anak tertinggi.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Meski angka perkawinan anak masih tinggi, namun dimensi lain dari pemenuhan dan perlindungan khusus anak di NTB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan ke arah lebih baik. Kondisi ini dapat dilihat dari meningkatnya kualitas

penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di NTB. Pada tahun 2023, Provinsi NTB berhasil ditetapkan menjadi Provinsi Layak Anak yang menunjukkan bahwa seluruh Kab./Kota di Provinsi NTB telah memeroleh Predikat KLA. Sementara pada tahun 2024 penilaian KLA masih pada tahap verifikasi administrasi. Hasil verifikasi administrasi KLA dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel Hasil Verifikasi Administrasi Kabupaten Kota Layak Anak (KLA)

Provinsi NTB Tahun 2024

No.	Kab/Kota	Nilai VL 2023	Nilai Mandiri 2024	Nilai VA 2024	Rekomendasi	Ket
1	Kota Bima	705	988,25	863,57	VL untuk Utama	Naik 1 Tingkat
2	Kab. Sumbawa Barat	530	903,30	853,39	VL untuk Utama	Naik 3 Tingkat
3	Kota Mataram	610	965,20	846,11	VL untuk Utama	Naik 2 Tingkat
4	Kab. Lombok Barat	710	930,95	780,28	Tetap Nindya	-
5	Kab. Sumbawa	505	873,06	777,8	VL untuk Nindya	Naik 2 Tingkat
6	Kab. Dompu	620	852,50	674,95	Tetap Madya	-
7	Kab. Lombok Utara	517,28	834,19	649,19	VL untuk Madya	Naik 1 Tingkat
8	Kab. Bima	580	833,79	603,13	VL untuk Madya	Naik 1 Tingkat
9	Kab. Lombok Timur	540	940,30	602,82	VL untuk Madya	Naik 1 Tingkat
10	Kab. Lombok Tengah	590	803,58	595,02	Tetap Pratama	-

Sumber : Tim Verifikasi KLA

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil Verifikasi Administrasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi NTB tahun 2024 menunjukkan sebagian besar kabupaten/kota mengalami peningkatan dalam penilaian administrasi, yang terlihat dari rekomendasi kenaikan tingkat KLA untuk tujuh dari sepuluh daerah kabupaten. Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kota Mataram direkomendasikan mencapai tingkat "Utama," sementara Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Dompu mempertahankan tingkat masing-masing di "Nindya" dan "Madya." Kabupaten Lombok Tengah tetap berada di tingkat "Pratama." Hasil ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Provinsi NTB, meskipun masih ada tantangan dan ruang untuk perbaikan di beberapa daerah. Namun, perlu ditekankan bahwa hasil ini masih bersifat administratif dan belum final. Penentuan tingkat KLA secara resmi akan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPA). Verifikasi lapangan ini akan menguji kesesuaian dokumen administrasi dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk implementasi program-program ramah anak, ketersediaan fasilitas pendukung, dan peran serta Masyarakat.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang ditawarkan

Berbagai kegiatan yang dilakukan DP3AP2KB Provinsi NTB untuk mendukung terwujudnya KLA di 10 kab/kota diantaranya adalah:

1. Melakukan advokasi percepatan KLA bagi Gugus Tugas – KLA di 10 kabupaten/kota;
2. Melakukan evaluasi dan pendampingan kepada 10 kab/kota berkaitan dengan data dukung indikator penilaian KLA di 5 Kluster;
3. Melaksanakan kegiatan temu forum anak tingkat Provinsi NTB untuk menyusun suara anak NTB Tahun 2024;
4. Menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi NTB untuk menyampaikan aspirasi atau suara anak kepada pemerintah daerah.
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak menjadi pendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus bagi mereka. Hal ini turut berkontribusi pada keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami anak, sebagai dampak dari pemahaman yang semakin baik mengenai perlindungan anak.
6. Berdasarkan data Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTB, per November 2024 tercatat 537 kasus kekerasan terhadap anak dengan 628 korban. Anak perempuan menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban, mencapai 433 orang, sedangkan anak laki-laki berjumlah 195 orang. Kabupaten Lombok Timur mencatatkan angka kasus tertinggi dengan 169 kasus, sedangkan Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah kasus terendah, yakni 14 kasus. Kekerasan seksual mendominasi jenis kasus, dengan 266 korban anak. Data lebih rinci terkait kekerasan terhadap anak tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Data Kekerasan terhadap Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan

Bentuk Kekerasan per November 2024

No	Kab/Kota	Jml Kasus	Jml Korban					Jml Korban Berdasarkan Bentuknya						
			L	P	T	Status Proses	Status Selesai	Fisik	Psikis	Seksual	Eksloitasi	Traficking	Penelantaran	Lainnya
1	Lombok Barat	49	18	36	54	53	1	19	2	26	1		2	5
2	Lombok Tengah	16	2	14	16	11	5	1	2	3				10
3	Lombok Timur	169	54	117	171	83	88	33	8	71	1		3	55
4	Sumbawa	14	2	13	15	14	1	3	2	12				
5	Dompu	21	74	18	92	92		3	6	13			3	74
6	Bima	67	18	54	72	72		20	8	48			4	3
7	Sumbawa Barat	20	4	16	20	17	3	4	3	15				
8	Lombok Utara	99	8	91	99	99		3	8	35	1			59
9	Kota Mataram	64	12	59	71	71		6	24	34	1		11	8
10	Kota Bima	18	3	15	18	18		8	4	9				1
Total		537	195	433	628	530	98	100	67	266	4	0	23	215

Sumber : Simfoni PPA

e. Alternatif solusi yang ditawarkan

Untuk alternative solusi yang ditawarkan pada tahun 2024 ini belum dapat kita Oleh karena itu, kabupaten/kota di NTB yang direkomendasikan untuk naik tingkat perlu terus memperkuat komitmen dalam memenuhi indikator KLA untuk memastikan keberhasilan pada tahap final verifikasi. Sebagai upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, DP3AP2KB Provinsi NTB terus mendorong pemerintah Kab/Kota sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak terkecuali perempuan dan anak. Selain itu, DP3AP2KB Provinsi NTB juga melakukan berbagai program/kegiatan pencegahan dan pemberian layanan komprehensif bagi korban kekerasan sebagai berikut.

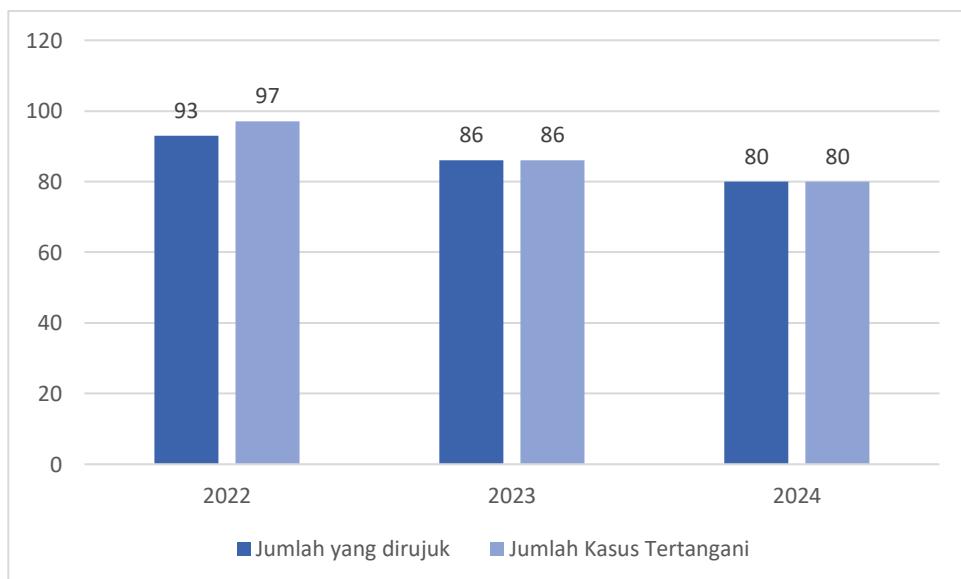
1. Advokasi anti kekerasan di lingkungan pendidikan (SMA/SMK, Madrasah dan Pondok Pesantren). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada murid dan guru cara pencegahan kekerasan terhadap anak melalui metode penyuluhan dan diskusi, hasil yang diperoleh bahwa murid-murid semakin memahami cara pencegahan kekerasan dan cara melaporkan apabila terjadi kejadian kekerasan di lingkungan sekolah. Adapun sekolah yang menjadi sasaran kegiatan ini yakni SMA Negeri 1 Mataram, Pesantren Raudhatul Azhar Kecamatan Masbagik Kab. Lombok Timur, Kegiatan di Gelanggang Remaja (SMA Negeri 4 Mataram, SMA Negeri 2 Mataram, SMA 3 Mataram, MAN 2

Mataram, SMA 6 Mataram, SD 4 Mataram), Ponpes Riyadhl Falah Aikmel Kab. Lombok Timur, Ponpes Ishlahul Ummah Dusun Paok Rempek, Desa Genggelang Kec. Gangga Kab Lombok Utara, Ponpes Al Halim Desa Keruak Kec. Kruak Kab. Lombok Timur, SMAK N 1 Tanjung Kab. Lombok Utara, SMA 1 Lingsar Kab. Lombok Barat Desa Bengkel Kabupaten Lombok Barat, Desa Bale Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;

2. Sosialisasi tindak pidana kekerasan seksual dan pencegahan perkawinan anak dengan total peserta sejumlah 40 orang anak;
3. Rapat koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan;
4. Rapat koordinasi perlindungan khusus anak; dan
5. Pelatihan manajemen dan penanganan kasus bagi SDM penyedia layanan di 10 kabupaten/kota.
6. Meskipun kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, akan tetapi capaian indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan tahun 2023 menunjukkan capaian sebesar 100 persen dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dirujuk sejumlah 86 kasus. Data tersebut tertera pada diagram berikut.

Tabel

Jumlah Korban Perempuan Dan Anak Yang Ditangani UPTD PPA Provinsi NTB  
Tahun 2022-2024



Sumber : UPTD PPA Provinsi NTB

Meskipun penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan mencapai angka 100 persen, tetapi tetap saja terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu

kendala tersebut adalah belum adanya tenaga psikolog klinis yang berstatus ASN sehingga dalam penanganan kasus harus meng-hire tenaga psikolog sehingga membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk penanganan kasus. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak di UPTD PPA.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam kegiatan untuk mendukung terwujudnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ada 2 (dua) program yang terlibat yaitu Program pemenuhan Hak anak dan Program perlindungan khusus anak.



Tabel 3. 5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Program	Indikator	Satuan	2024						Relevan/Tidak Relevan	Efisiensi.
			Target	Realisasi Fisik	Tk Capaian	Pagu	Realisasi Keu	Tk Capaian		
Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Kabupaten/Kota Yang Mendapat Bimbingan KLA	Kab	10	10	100%	<b>404,625,050</b>	<b>379,905,780</b>	<b>93,8%</b>	Relevan	24.719,270
Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya kualitas lembaga layanan perlindungan anak yang aktif.	Per센	50	50	100%	<b>168,278,300</b>	<b>164,336,180</b>	97,6%	Relevan	3.942.120

- g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tahun 2024, Dinas P3AP2KB Provinsi NTB telah melaksanakan berbagai program strategis dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program-program ini dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan yang responsif gender, memperkuat pemberdayaan perempuan, serta mendorong pencapaian predikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Selain itu, fokus utama juga diarahkan pada upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang menjadi salah satu prioritas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua.

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sesuai dengan Perjanjian Kinerja			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
1	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan Bimbingan / Pembinaan KLA	10 Kab / Kota	10 Kab/ Kota	Tidak adanya mekanisme reward dan punishmet dari pemerintah pusat untuk mendukung penyelenggaraan KLA di Kab/Kota membuat jemu dan cenderung tidak bersemangat.	Melakukan advokasi dan pendampingan secara berkelanjutan kepada kabupaten/kota untuk mendorong mereka meningkatkan kualitas penyelenggaraan KLA di setiap daerah.
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	250 Lmbg	250 Lmbg		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dok	1 Dok		

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sesuai dengan Perjanjian Kinerja			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
		Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah PD yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	49 PD	49 PD	Pelembagaan pemenuhan hak anak belum menjadi isu di masing-masing perangkat daerah. Masih ada anggapan bahwa urusan anak hanya menjadi tanggungjawab DP3AP2KB	Melibatkan perangkat daerah lingkup Provinsi NTB dalam tim evaluasi KLA dan gugus tugas Provila. Tim ini diberikan pemahaman bahwa pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab bersama
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Anak yang mendapat peningkatan kualitas	10 lembaga	10 Lembaga		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Keg	1 Keg		
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan anak yang aktif	50%	100%		
		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak	550 kasus	537 kasus		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dok	1 Dok		
		Penguatan dan Pengembangan	Jumlah Lembaga	10 Lmbg	10 Lmbg		

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sesuai dengan Perjanjian Kinerja			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
		Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Penyedia Layanan yang Mendapatkan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Layanan				
		Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	10 org.	10 Org		
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi	Jumlah penerimaan pengaduan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi	86 org.	51 Org.	Belum adanya tenaga ahli (psikolog klinis) yang berstatus ASN sehingga diperlukan jasa psikolog dari luar.	Pengusulan tenaga ahli (sikolog klinis) kepada BKD.
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan kewenangan Provinsi	80 org.	51 Org.		

Meskipun terdapat berbagai keberhasilan dalam capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaranya. Berbagai permasalahan dan solusinya sebagaimana tabel berikut.

Tabel

Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Komitmen pemerintah dalam pengarusutamaan gender di NTB masih terbatas pada Peraturan Gubernur NTB Nomor 39 Tahun 2014, yang belum diubah menjadi Peraturan Daerah, sehingga kekuatan hukumnya masih lemah. Akibatnya, regulasi terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) tidak memuat sanksi tegas bagi perangkat daerah yang tidak melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), sehingga pelaksanaan PPRG kurang diperhatikan.	Membangun komitmen pimpinan dan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di semua sektor pembangunan, serta memaksimalkan peran Driver PUG dalam mengawal seluruh proses pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan. Dengan demikian, diharapkan kualitas penyelenggaraan PUG dapat meningkat secara efektif.
2.	Pelembagaan pemenuhan hak anak dan pengarusutamaan gender belum menjadi prioritas di banyak Perangkat Daerah. Padahal, urusan perempuan dan anak seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya DP3AP2KB. Setiap Perangkat Daerah perlu mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan perlindungan anak yang lebih baik.	Mengoptimalkan peran driver Pokja PUG, terutama Bappeda, dalam mengawal rencana program dan kegiatan di setiap perangkat daerah agar memperhatikan isu perempuan dan anak. Sehingga urusan perempuan dan anak terintegrasi dalam kebijakan di berbagai sektor pembangunan.
3.	Sumber Daya Manusia, baik perencana PPRG maupun auditor PPRG, belum memiliki sertifikasi, sehingga penyusunan PPRG belum optimal dan masih dilakukan melalui rapat-rapat serta pendampingan.	Melakukan penataan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas SDM sesuai dengan potensi dan kompetensi mengingat bahwa PUG sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus mendapat perhatian karena memegang peran penting.

No	PERMASALAHAN	SOLUSI
4.	Terbatasnya kompetensi SDM perencana di setiap perangkat daerah dalam memahami ketimpangan gender sesuai tusi perangkat daerahnya sehingga tidak mampu mengeksplor permasalahan dan kebijakan sebagai solusinya yang dituangkan dalam dokumen PPRG sebagai dasar penyusunan ARG	Mendorong SDM perencana PPRG di perangkat daerah lingkup Provinsi NTB untuk melakukan analisis terhadap lebih dari satu subkegiatan, dengan mempertimbangkan subkegiatan prioritas yang menjadi tugas dan fungsi utama dinas terkait.
5.	Ketiadaan mekanisme <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dari pemerintah pusat bagi kabupaten/kota yang menyelenggarakan KLA menyebabkan kurangnya motivasi dan antusiasme daerah dalam menjalankan program KLA, sehingga mereka cenderung kurang bersemangat dalam mengimplementasikannya.	Melakukan advokasi dan pendampingan secara berkelanjutan kepada kabupaten/kota untuk mendorong mereka meningkatkan kualitas penyelenggaraan KLA di setiap daerah.
6.	Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui UPTD PPA Provinsi belum maksimal akibat terbatasnya sarana dan prasarana. Selain itu, belum adanya tenaga psikolog berstatus ASN (tenaga tetap) dalam penanganan kasus juga menjadi kendala, sehingga diperlukan anggaran lebih besar untuk membiayai penanganan kasus tersebut.	Pendampingan kasus dilakukan dengan melibatkan tenaga psikolog dari luar, dengan memperhatikan ketersiaan anggaran. Pada tahun 2024, telah diajukan permohonan kepada BKD untuk menempatkan tenaga psikolog berstatus ASN di UPTD PPA.

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2024

### A.3. Terwujudnya Peningkatan kepesertaan ber-KB.

Pengendalian penduduk adalah upaya untuk menyeimbangkan jumlah penduduk dengan dayadukung lingkungan, kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya. Pengendalian penduduk bertujuan untuk mengendalikan lingkungan dan meminimalisir bencana alam, menekan angka kematian ibu dan bayi, mencegah pernikahan usia dini, meningkatkan kepesertaan keluarga berencana. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar. Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi NTB melalui tiga sub urusan yakni, (1) Pengendalian Penduduk, (2) Keluarga Berencana, dan (3) Keluarga Sejahtera.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan ketiga sub urusan diatas, DP3AP2KB Provinsi NTB menetapkan satu sasaran strategis dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 yaitu: Tewujudnya peningkatan kepesertaan ber-KB. Sasaran strategis ini diharapkan dapat menjawab permasalahan laju pertumbuhan penduduk tinggi dan persebaran pendudukan belum merata. Tingginya laju pertumbuhan penduduk terjadi karena kelahiran alamiah dan migrasi penduduk belum terkendali optimal. Persebaran penduduk di NTB belum merata karena aktivitas ekonomi di Pulau Lombok lebih tinggi daripada di Pulau Sumbawa sehingga penduduk lebih banyak bertempat tinggal di Pulau Lombok. Selain aktivitas ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan serta akses informasi lebih cepat diperoleh di Pulau Lombok daripada di Pulau Sumbawa. Selain itu program keluarga berencana belum optimal menunjukkan dampaknya karena sosialisasi yang belum efektif.

#### a. Membandingkan antara target dan realisasi

Dari Tabel dibawah dapat diliat bahwa Realisasi kinerja Tahun 2024 ini mengalami peningkatan dari target kinerja yaitu target 2024 sebesar 75 persen dan realisasinya adalah sebesar 75,5%. Artinya bahwa terjadi Peningkatan dalam hal jumlah kepesertaan ber-KB dala, Masyarakat, dimana jumlah pengguna alat kontrasepsi modern mengalami peningkatan dari target yang diharapkan.

Tabel

Capaian Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	2024	
			Target	Realisasi
1	Tewujudnya peningkatan kepesertaan ber-KB	mCPR	75%	75,5%*

Sumber: BKKBN Perwakilan Provinsi NTB, 2024

Keterangan: \*Angka Sementara

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, seperti tabel 3.2

Tabel Capaian Kinerja Terwujudnya peningkatan kepesertaan ber-KB tahun 2023-2024

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2023	2024	
				Target	Realisasi
1	Tewujudnya peningkatan kepesertaan ber-KB	mCPR	60,19%	75%	75,5%*

e. Sumber: BKBN Perwakilan Provinsi NTB, 2024

f. Keterangan: \*Angka Sementara

Dari Tabel diatas dapat diliat bahwa angka mCPR Pada tahun 2024 mengalami peningkatan disbandingkan tahun 2023 yaitu dari 60,19 persen naik menjadi 75,5 persen , Hal ini menunjukkan perkembangan yang sifatnya positif, dimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan jumlah kepesertaan ber KB dalam masyarakat mendapatkan hasil yang positip..

mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) adalah persentase pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi modern. Kontrasepsi modern yang dimaksud adalah alat atau cara KB seperti sterilisasi wanita (MOW), sterilisasi pria (MOP), pil, IUD, suntuk, susuk KB (implan) dan kondom. Tujuan penggunaan mCPR adalah untuk menunda, mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran. Pencapaian target indikator mCPR tahun 2023 sebesar 60,19 persen sementara tahun 2024 sebesar 75,5 persen (angka sementara). Melihat capaian mCPR tahun 2023-2024, mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu 15,31 poin. Capaian mCPR NTB 60,19 persen masuk kategori normal (capaian>60). Capaian mCPR di beberapa kabupaten/kota masih kategori waspada yaitu: Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram dan Kota Bima.

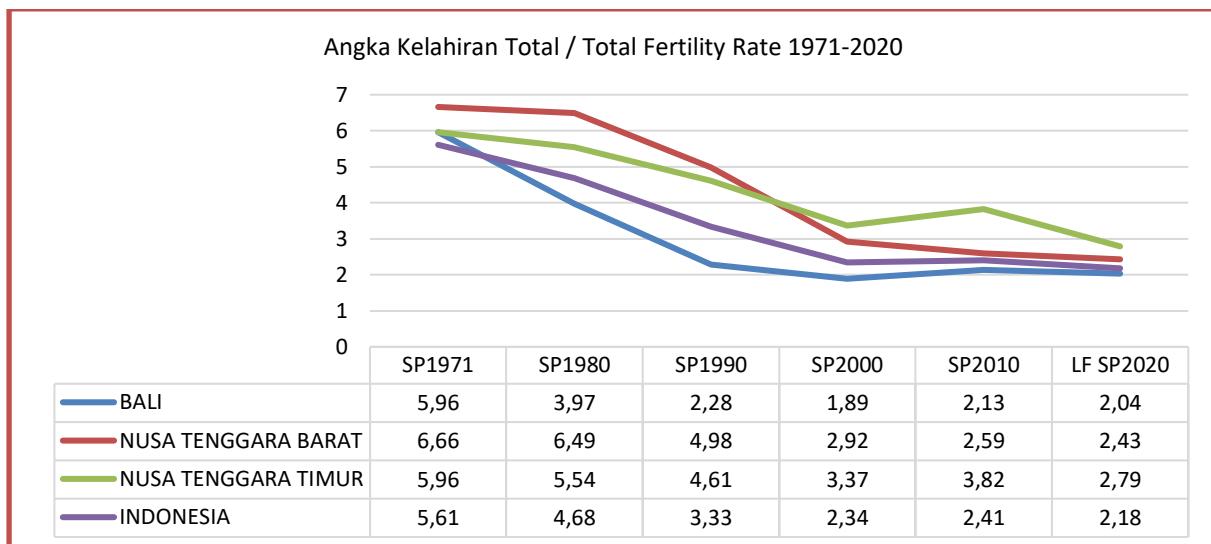
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Untuk mengukur kinerja upaya pengendalian penduduk, selain mengukur penggunaan mCPR pada pasangan usia subur, juga perlu dilihat angka kelahiran total (TFR). TFR adalah rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Angka TFR sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan meningkatkan rata-rata usia kawin pertama perempuan, meningkatkan program pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan perawatan anak;

mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Angka TFR yang ideal bagi seluruh negara adalah 2,1 anak per wanita per tahun, yang disebut juga dengan istilah penduduk tumbuh seimbang. Dari data dibawah dikaetahui bahwa Indonesia sudah mencapai TFR yang ideal, demikian pula dengan Provinsi Bali (2,04). Untuk Provinsi NTB belum mencapai TFR kondisi ideal

Grafik

#### Angka Kelahiran Total/TFR 1971-2020

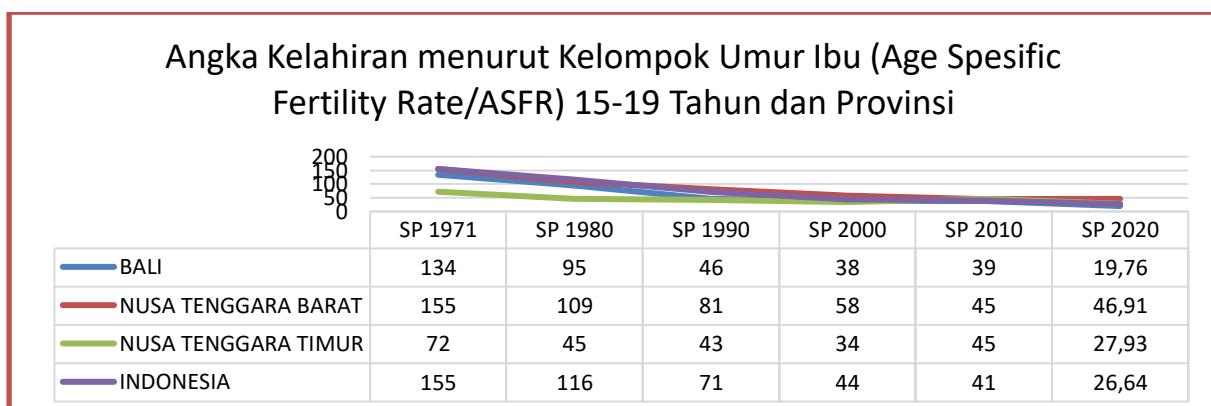


Sumber: Sensus Penduduk (SP) dan Long Form SP2020, BPS

Indikator lainnya untuk mengukur keberhasilan pembangunan kependudukan adalah melihat capaian rata-rata angka kelahiran menurut umur atau age specific fertility rate (ASFR) di usia 15-19 tahun. ASFR usia 15-19 tahun menunjukkan bahwa masih ada kelahiran dari ibu yang masih berusia anak. Data ASFR 15-19 tahun menunjukkan bahwa masih ada kelahiran yang beresiko yang berdampak pada kejadian stunting.

Grafik

#### Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 5-19 Tahun dan Provinsi



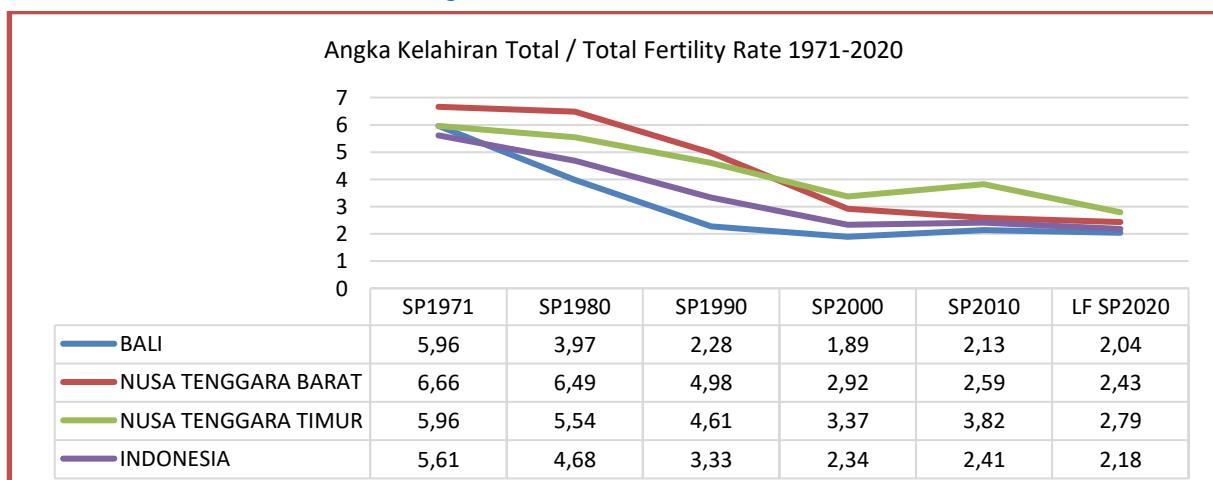
Sumber: Sensus Penduduk (SP) dan Long Form SP2020, BPS

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang ditawarkan.

Dalam upaya meningkatkan mCPR di Provinsi NTB, Dinas P3AP2KB telah melaksanakan serangkaian program strategis. Salah satu kegiatan utamanya adalah peningkatan peran serta dan kerjasama organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) di lima kabupaten/kota. Kegiatan ini melibatkan 14 organisasi kemasyarakatan (Ormas) di setiap lokasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta Ormas dalam mendukung program Keluarga Berencana (KB) dan membangun komitmen mereka untuk lebih aktif menggerakkan anggota atau konstituen menjadi peserta KB aktif. Selain itu, FGD menjadi sarana dialog untuk menggali aspirasi dan tantangan di lapangan, di mana peserta mengusulkan peningkatan koordinasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dari pengampu urusan KB agar pelayanan KB dapat lebih optimal.

Untuk mengukur kinerja upaya pengendalian penduduk, selain mengukur penggunaan mCPR pada pasangan usia subur, juga perlu dilihat angka kelahiran total (TFR). TFR adalah rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Angka TFR sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan meningkatkan rata-rata usia kawin pertama perempuan, meningkatkan program pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan perawatan anak; mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Angka TFR yang ideal bagi seluruh negara adalah 2,1 anak per wanita per tahun, yang disebut juga dengan istilah penduduk tumbuh seimbang. Dari data dibawah diketahui bahwa Indonesia sudah mencapai TFR yang ideal, demikian pula dengan Provinsi Bali (2,04). Untuk Provinsi NTB belum mencapai TFR kondisi ideal

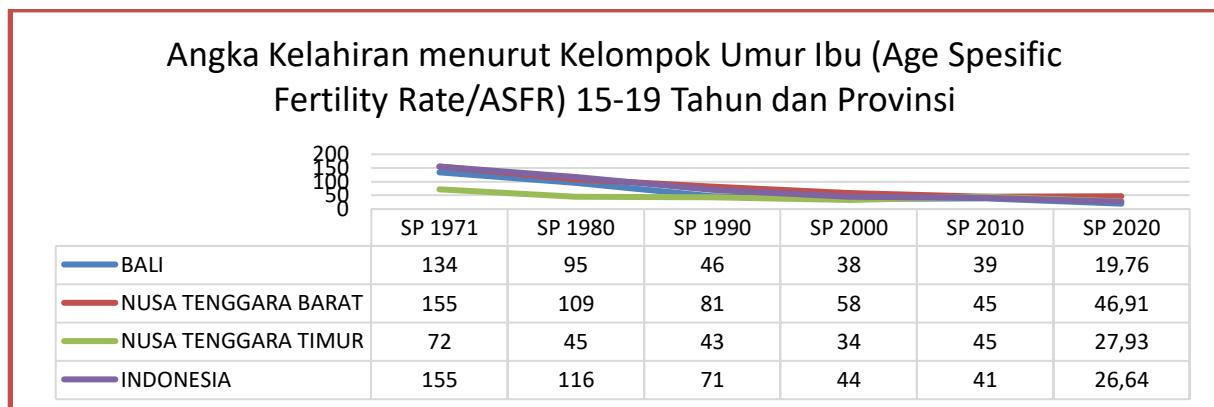
Grafik Angka Kelahiran Total/TFR 1971-2020



Sumber: Sensus Penduduk (SP) dan Long Form SP2020, BPS

Indikator lainnya untuk mengukur keberhasilan pembangunan kependudukan adalah melihat capaian rata-rata angka kelahiran menurut umur atau age specific fertility rate (ASFR) di usia 15-19 tahun. ASFR usia 15-19 tahun menunjukkan bahwa masih ada kelahiran dari ibu yang masih berusia anak. Data ASFR 15-19 tahun menunjukkan bahwa masih ada kelahiran yang beresiko yang berdampak pada kejadian stunting.

Grafik Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) 15-19 Tahun dan Provinsi



Sumber: Sensus Penduduk (SP) dan Long Form SP2020, BPS

Pemerintah NTB melalui DP3AP2KB telah melakukan berbagai program kegiatan untuk menekan *Age-Specific Fertility Rate* (ASFR) pada usia 15-19 tahun. Salah satu kegiatan strategisnya adalah sosialisasi kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan. Kegiatan ini menyasar peserta didik tingkat SMP dan SMA, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi serta bahaya dan dampak negatif dari perkawinan anak. Dengan membangun kesadaran sejak dini, diharapkan remaja lebih memahami pentingnya menunda usia perkawinan, sehingga angka pernikahan dini dapat ditekan secara signifikan.

#### e. Alternatif solusi yang ditawarkan

Beberapa program yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024 dalam mendorong terwujudnya kesertaan ber-KB yaitu program pengendalian penduduk dengan melakukan penyusunan Grand Design Kependudukan; program pembinaan keluarga berencana melalui kerjasama organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dengan melakukan peningkatan kapasitas bagi: kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di kampung KB; kader BKB; kader BKL; kader BKR; dan kader UPPKS.



f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3. 5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Program	Indikator	Satuan	2024						Relevan/Tidak Relevan	Efisiensi.
			Target	Realisasi Fisik	Tk Capaian	Pagu	Realisasi Keu	Tk Capaian		
Program pengendalian Penduduk	Terlaksananya pemamfaatan GDPK oleh perangkat daerah	%	15	15	100%	30,590,400	23,772,460	77,7%	Relevan	6.817.940
Program Pembinaan keluarga berencana	Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan ber-KB	Org	10	10	100%	94,447,200	70,089,048	74,2%	Relevan	24.358.152
Program Peningkatan dan pemberdayaan keluarga Sejahtera	Meningkatnya cakupan satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK- R	%	100	100	100%	446,700,000	387,550,000	86,7%	Relevan	59.150.000

- g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel

Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sesuai dengan Perjanjian Kinerja			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
1	Tewujudnya peningkatan kepesertaan ber-KB	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan GDPK dalam Dokumen Perencanaan	15%	0%	Pergub No. 20 Tahun 2024 tentang GDPK sudah terbit namun masih penyempurnaan dokumen lampirannya, sehingga sosialisasi dan advokasi belum dapat dilaksanakan.	Sosialisasi ke Perangkat Daerah dilaksanakan pada TA 2025
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Jumlah Dokumen GDPK yang Disusun	1 Dok	1 Dok	Dokumen GDPK baru dapat diselesaikan pada akhir Semester 2 sehingga sosialisasi ke PD tertunda	Sosialisasi ke Perangkat Daerah dilaksanakan pada TA 2025
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dok	1 Dok	-	-
		Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	4 Lap	0 Lap	Dokumen GDPK baru dapat diselesaikan pada Triwulan ke IV sehingga	Sosialisasi ke Perangkat Daerah dilaksanakan pada TA 2025

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sesuai dengan Perjanjian Kinerja			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
						sosialisasi ke PD tertunda	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	10 Organ.	10 Organ.		
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	10 Organ.	10 Organ.	Sebagian besar Ormas belum dapat mengakses layanan Kesertaan Ber-KB karena kurangnya informasi yang diterima	Perlunya penyebaran informasi secara intensif dan massif oleh pengampu KB
		Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	5 Organ.	10 Organ.	-	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Jumlah Satuan Pendidikan Formal yang Melaksanakan PIK-R	10 Satdik Formal	10 Satdik Formal		
		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi yang dibina terkait Pengembangan PIK-R	50%	20%		

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sesuai dengan Perjanjian Kinerja			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
		Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	3 Dok	2 Dok	Pelaksanaan fasilitasi, pembimbingan, pengembangan, dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK belum dilakukan oleh semua Ormas Mitra	Pelaksanaan fasilitasi hanya dilakukan oleh dua Ormas Mitra yakni, DWP dan BKOW
		Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Kelompok Genre yang mendapat Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	2 Klp	2 Klp	-	-
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kab/Kota yang dibina	2 Kab / Kota	10 Kab / Kota	-	-
		Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga	2 Organ.	2 Organ.	Koordinasi dan sinkronisasi antara mitra dengan PD Pengampu belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan.	Perlu peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara mitra dengan PD Pengampu

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sesuai dengan Perjanjian Kinerja			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
		Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				

h. Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi NTB berfokus pada tiga program utama, yaitu pengendalian penduduk, program pembinaan keluarga berencana (KB) dan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS).

Program pengendalian penduduk dilaksanakan melalui kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendukung pengendalian kualitas penduduk, dengan subkegiatan penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di tingkat Provinsi, yang bertujuan untuk merancang langkah-langkah strategis dalam mencapai pembangunan kependudukan yang lebih berkualitas di NTB. Adapun kegiatan utama dari sub kegiatan ini adalah penyusunan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Salah satu upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan meningkatkan kesertaan ber-KB. Mendukung upaya tersebut, DP3AP2KB melaksanakan program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan kegiatan utamanya adalah peningkatan peran serta dan kerjasama organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) di lima kabupaten/kota. Tujuan dari kegiatan ini diantaranya untuk: 1) Mengenal permasalahan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB; 2) Mengetahui sumber daya yang ada dalam peningkatan dan pengembangan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB; dan 3) Mendapat masukan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Kegiatan ini melibatkan 14 organisasi kemasyarakatan (Ormas) di setiap lokasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta Ormas dalam mendukung program Keluarga Berencana (KB) dan membangun komitmen mereka untuk lebih aktif menggerakkan anggota

atau konstituen menjadi peserta KB aktif. Selain itu, FGD menjadi sarana dialog untuk menggali aspirasi dan tantangan di lapangan, di mana peserta mengusulkan peningkatan koordinasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dari pengampu urusan KB agar pelayanan KB dapat lebih optimal. Dari kegiatan ini, dihasilkan beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut.

1. Sinergitas dan kolaborasi berbagai pihak perlu ditingkatkan secara kontinu dengan mengikutsertakan organisasi kemasyarakatan dalam implementasi program Bangga Kencana dan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB khususnya di Kota Bima dan Kabupaten Bima.
2. Pelibatan unsur pendamping masyarakat yang beroperasi di lapangan seperti TKP, KPM, PKH, TPK, PLKB/PKB, bersama organisasi kemasyarakatan perlu ditingkatkan terutama dalam pemaduan data masyarakat sasaran dalam menangani isu-isu tematik seperti stunting, kemiskinan, dan program Bangga Kencana di Kota Bima dan Kabupaten Bima.
3. Koordinasi pelaksanaan kesertaan ber-KB di tingkat desa perlu melibatkan pihak-pihak terkait lainnya seperti Dokter, Toga, tomas, organisasi masyarakat lainnya dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesertaan ber-KB di Kabupaten Lombok Barat.
4. Perlu adanya pembagian peran dan tugas tenaga ditingkat lapangan sehingga mampu bekerjasa secara optimal sebagai upaya meningkatnya kesertaan ber-KB di Kabupaten Lobar.

Sementara itu, program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera diarahkan pada pemberian makanan tambahan (PMT) pada bayi stunting, bimbingan teknis bagi kader posyandu dalam rangka peningkatan peran serta kader dalam menekan stunting. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang lain belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan urusan tersebut beririsan dengan yang dilakukan dengan instansi terkait (BKKBN) dan pemerintah Kab/Kota.

Pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AP2KB Provinsi NTB melibatkan kerjasama dengan mitra organisasi kemasyarakatan, yakni Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi NTB. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan skema pendanaan dukungan pelaksanaan kegiatan. Kedua mitra tersebut melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB  
Dukungan kegiatan dalam bentuk Sosialisasi Posyandu Keluarga, Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan, Kemah Kader Posyandu, dan pemberian makanan tambahan (PMT) pada bayi stunting.
2. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi NTB

Dukungan kegiatan DWP dalam bentuk kegiatan percepatan penurunan stunting di 10 Kab/Kota dan gerakan peduli lansia.

Dalam penyelenggaraan pembangunan pengendalian penduduk dan KB di Provinsi NTB tahun 2024 tidak terlepas dari permasalahan. Permasalahan yang dihadapi telah diambil solusinya sebagai berikut.

Tabel

Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2024

PERMASALAHAN	SOLUSI
Sosialisasi dan pemanfaatan dokumen GDPK belum dapat dilakukan pada tahun 2024, mengingat dokumen GDPK final baru diselesaikan pada semester II tahun 2024. Hal ini menyebabkan rencana untuk sosialisasi dokumen tersebut harus tertunda hingga dokumen selesai dan siap digunakan secara efektif.	Sosialisasi dan pemanfaatan dokumen GDPK direncanakan ulang pada tahun anggaran 2025 dan menjadi kegiatan prioritas.
Cakupan tugas dan fungsi bidang PPKB belum didukung sumberdaya yang memadai, seperti kesesuaian kualifikasi dan/atau kompetensi personel ( <i>man</i> ), keterbatasan anggaran ( <i>money</i> ), bahan ( <i>materials</i> ), alat kerja ( <i>machines</i> ), prosedur dan tata kerja ( <i>methods</i> ).	Membentuk tim kerja yang melibatkan staf atau pegawai dari luar bidang PPKB untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia guna mendukung kelancaran program.
Koordinasi dengan mitra terkait untuk merumuskan rencana program kegiatan terkendala oleh terbatasnya waktu, sehingga kegiatan yang diusulkan sulit diarahkan untuk mendukung target kinerja yang diampu oleh dinas.	Melakukan penyesuaian kegiatan pada anggaran perubahan, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang tidak relevan dengan indikator sub kegiatan yang sudah tertera dalam nomenklatur.
Pelaksanaan fasilitasi, pembimbingan, pengembangan, dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK belum dilakukan oleh semua Ormas Mitra	Pelaksanaan fasilitasi hanya dilakukan oleh dua Ormas Mitra yakni, DWP dan BKOW
Sebagian besar Ormas di Kabupaten/Kota belum dapat mengakses layanan Kesertaan Ber-KB karena kurangnya informasi yang diterima	Melakukan advokasi kepada instansi pengampu urusan KB untuk melakukan penyebaran informasi secara intensif dan massif.

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2024





## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Realisasi kinerja merupakan hasil nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan, dan apabila dikatakan berhasil realisasi kinerja diatas target atau lebih dari target. Kesimpulan kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### 1) Terwujudnya Kesetaraan Gender

Salah satu Indikator yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender, yang mencerminkan sejauh mana perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dengan laki-laki dalam berkontribusi pada kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Jika membandingkan IDG NTB dengan nasional, posisi NTB masih berada di bawah nasional. IDG NTB cenderung menurun sejak tahun 2021 sampai 2023. Nilai IDG untuk tahun 2024 belum dipublish oleh BPS.

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di NTB digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif atau partisipasi perempuan di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Sehingga pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender perlu ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui akses, manfaat, kontrol dan partisipasi.

#### 2) Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Meski angka perkawinan anak masih tinggi, namun dimensi lain dari pemenuhan dan perlindungan khusus anak di NTB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan ke arah lebih baik. Kondisi ini dapat dilihat dari meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di NTB. Pada tahun 2023, Provinsi NTB berhasil ditetapkan menjadi Provinsi Layak Anak yang menunjukkan bahwa seluruh Kab./Kota di Provinsi NTB telah memeroleh Predikat KLA. Sementara pada tahun 2024 penilaian KLA masih pada tahap verifikasi administrasi. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan sebuah kota yang layak bagi anak dengan menciptakan kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak dan memberi perlindungan terhadap kehidupan anak melalui pengintegrasian

komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam sebuah kebijakan, program ataupun kegiatan. Hal ini dilakukan agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera untuk nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

### **3) Terwujudnya Peningkatan Kepesertaan ber KB**

Realisasi kinerja terhadap capaian indikator rata-rata usia kawin pertama perempuan sampai dengan akhir tahun dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yakni sebesar 20,49 Tahun sementara pada tahun 2023 tingkat capaian adalah 100 % dengan realisasi 20,80\* tahun.

Hal ini menunjukkan kenaikan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa kerja keras pemerintah daerah provinsi NTB dalam meningkatkan usia perkawinan pertama pada anak dapat dikatakan berhasil.

## **B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja**

Salah satu upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan meningkatkan kesertaan ber-KB. Mendukung upaya tersebut, DP3AP2KB melaksanakan program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan kegiatan utamanya adalah peningkatan peran serta dan kerjasama organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

Dari 3 (Tiga ) indikator kinerja yaitu 1) Terwujudnya Kesetaraan Gender 2) Terwujudnya Pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dan 3) Terwujudnya peningkatan Kepesertaan Ber Kb , masing masing terjadi peningkatan sesuai dengan target kinerja.

Berikut ini menguraikan langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja di masa-masa yang akan datang yaitu:

#### **1) Terwujudnya Kesetaraan Gender**

Upaya untuk memperbaiki kinerja di tahun-tahun yang akan datang perlu ditingkatkan terus pendampingan dan bimbingan teknis bagi OPD di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Disamping itu untuk mendukung capaian indikator/komponen IDG yaitu perlu melaksanakan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan, bimbingan teknik tentang urusan pemerintah antara lain urusan politik pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, penundaan perkawinan usia muda melalui program kesehatan reproduksi remaja, dan lain-lain.

#### **2) Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak**

Anak merupakan pewaris masa depan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan,program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Negara dan masyarakat kepada anak-anak Indonesia saat ini akan sangat menentukan masa depan.Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun anak Indonesia, namun situasi dan kondisi anak-anak hingga saat ini

masih jauh dari harapan. Salah satu penyebab kondisi anak-anak Indonesia yang belum menggembirakan ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik, integratif, dan berkelanjutan. Selama ini pembangunan anak dilaksanakan secara parsial dan sektoral, sehingga masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kebijakan KLA perlu dikembangkan di seluruh kabupaten/kota, sehingga akan terwujud Provinsi NTB yang layak bagi anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak.

### **3) Terwujudnya Peningkatan Kepesertaan Ber KB**

Beberapa program yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Provinsi NTB Tahun 2024 dalam mendorong terwujudnya kesertaan ber-KB yaitu program pengendalian penduduk dengan melakukan penyusunan Grand Design Kependudukan; program pembinaan keluarga berencana melalui kerjasama organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dengan melakukan peningkatan kapasitas bagi: kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di kampung KB; kader BKB; kader BKL; kader BKR; dan kader UPPKS.

.

